

Resume

MERENTAS JALAN PANJANG PERDAMAIAAN: NEGARA & MASYARAKAT DALAM RESOLUSI KONFLIK#

Syafuan Rozi*

Abstract

Horizontal conflicts that occurred in Central Sulawesi, Maluku, and North Maluku have caused more than five thousands casualties and more than five hundred thousands IDPs in North Sulawesi. The conflict has segregated the society into separated communities that live base on religion: Islam and Christian. Research on anatomy of violence in Indonesia has showed a great development since 1990s. The research was only focused on dominant actors and groups. The research seldom included religious leaders, local leader, and youth leader; neither had it involved IDPs as research object. Therefore this research suggests a development of people economic model that create cooperation between each members of society. The model itself can generate family base economic empowerments that promote communalization among and intra-society. Base on that idea, folks festival been held periodically, with each villages can produce its special craft and product. Folk's festival can act as peacemaker in annihilating reason for conflict. Local wisdom such as panas pela, hibualamo need to be introduced among generations of people.

Pendahuluan

Keterlibatan negara dan masyarakat dalam resolusi konflik di Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara relatif beragam sesuai keadaan setempat saat darurat militer, darurat sipil, dan tertib sipil. Untuk kasus Poso di Sulteng sampai tahun 2006 (era Presiden SBY), daerah ini masih mengalami kondisi pembunuhan, penembakan, dan pengeboman sporadis. Daerah ini pun masih ada gejala *weak state* (lemah) atau *failure state* (gagal) de-escalasi konflik di Poso. Langkah perlucutan senjata dan penghentian kekerasan tampaknya relatif belum berhasil dituntaskan. Kondisi Ambon, Maluku, pun awalnya demikian. Bila ditinjau

dari tahapan resolusi konflik, kondisi Ambon saat ini masih dalam tahap persiapan untuk menuju *peace building*, yaitu rekonsiliasi pada tahap awal. Beberapa indikator kondisi konflik masih belum sepenuhnya menuju ke arah *peace building* karena tahap intervensi konflik masih terlalu banyak persoalan untuk bisa dilalui.

Penelitian ini mengkaji keterlibatan negara dan masyarakat dalam proses resolusi konflik dan bagaimana pola hubungan negara dan masyarakat yang berlangsung dalam resolusi konflik tersebut. Data menunjukkan resolusi konflik baru melewati de-escalasi konflik untuk kasus Poso (Sulteng) dan tahap intervensi kemanusiaan untuk kasus Ambon di Maluku (Ternate, Tidore, Jailolo, Tobelo) dan di Maluku Utara. Walaupun begitu, suatu program sudah mulai diletakkan sebagai dasar bagi tahap *problem solving orientation* dan *peace building* dengan indikasi dihidupkan kembali adat dan ikatan

* Penelitian ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari Syafuan Rozi (koordinator), Dhuroruddin Mashad, Emilia Yustiningrum, Moch. Nurhasim, Tri Ratnawati, Heru Cahyono, dan Septi Satriani dengan fokus kasus Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara.

• Penulis adalah peneliti pada Bidang Penelitian Politik Nasional, P2P LIPI, Jakarta.

persaudaran (*hibuolamo, panas-pela, baku-bae, Sintuwu Maroso*). Masalah relokasi pengungsi, *trauma healing* pascakonflik dan pemberdayaan ekonomi lokal belum mencapai titik yang menggembirakan.¹

Catatan Penyembuhan Luka Bangsa

Terjadinya konflik horizontal di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara telah berdampak lebih kurang lima ribuan orang meninggal dunia dan sekitar lima ratus ribu orang menjadi pengungsi ke Sulawesi Utara dan sekitarnya. Konflik itu telah membelah masyarakat (segregasi pemukiman) menjadi komunitas yang tinggal berpisah mengelompok berdasarkan agama Islam dan Kristen. Penelitian tentang anatomi kekerasan di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan sejak tahun 1990. Studi-studi yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa penanganan konflik di daerah-daerah yang dilanda konflik horizontal memperlihatkan kecenderungan yang masih elitis dengan keterlibatan aktor atau kelompok dominan tertentu saja, dengan tidak melibatkan masyarakat (tokoh adat, tokoh agama, tokoh muda laki-perempuan, para pengungsi) yang justru paling menderita akibat konflik.

Konflik Poso, umpamanya, terlalu kompleks jika dianalisis hanya berdasar urutan peristiwa, mengingat intensitas dan ekstensitas wilayah dan pelaku konflik antarperistiwa memperlihatkan perbedaan sangat mendasar. Pada konflik Desember 1998 dan April 2000, intensitas dan wilayah konflik sangat terbatas di sebagian kecil kecamatan kota. Namun, mulai bulan Mei–

Juni 2000, dilanjutkan Juli 2001 dan November–Desember 2001, konflik menjadi sangat akut di Poso, dan mengarah pada upaya menihilkan eksistensi lawan, terlihat dari realitas korban tanpa pandang bulu, termasuk perempuan dan anak-anak. Telah terbangun solidaritas kelompok secara tegas melalui ideologisasi konflik berdasar isu agama dan etnisitas sehingga konflik menjadi bersifat sangat intensif (kekerasan dan korban) dan ekstensif (wilayah dan pelaku).

Sementara konflik yang meletus di Maluku Utara 1999–2000 dapat dikatakan merupakan dampak atau rentetan konflik yang sebelumnya pecah di Ambon. Kecuali itu, pembentukan dan pemekaran kecamatan Malifut, turut memiliki andil dalam memicu konflik karena kebijakan tersebut telah menimbulkan ketidaksenangan dari masyarakat suku Kao (beragama Kristen) yang merupakan penduduk asli, terhadap suku Makian (beragama Islam) yang pendatang. Kerusuhan horizontal yang telah menjadi pertempuran massal ini memakan korban jiwa sangat besar. Konflik berlangsung secara bergelombang, dengan identitas agama yang kuat. Pelajaran dari kebijakan pemekaran wilayah di saat negara melemah (*weak state*) ini menjadi mahal. Kegagalan, “pembiaran” dan kelemahan negara dalam melakukan de-escalasi konflik, perlucutan senjata, penegakan hukum, mengawal akuntabilitas dana intervensi kemanusian untuk tidak dikorupsi, membuat peran negara yang baik dalam resolusi konflik cenderung belum mudah untuk dicapai.

Di Poso, sejak awal konflik meletus tahun 1998, sebagian besar elemen masyarakat telah secara mandiri membangun inisiatif untuk mengakhiri konflik dan berusaha mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Para tokoh dua komunitas mengadakan pertemuan Tagolu dan sepakat untuk berusaha menghentikan konflik dan bersama-sama memberantas penjualan minuman keras yang mereka nilai sebagai

¹ Lemahnya koordinasi dan strategi dalam penanganan konflik, dengan alasan bahwa TNI dan Polri takut dianggap melanggar hukum dan HAM. Faktor ini menandai bahwa Indonesia belum memiliki “tools” atau perangkat hukum dan operasional yang mengatur bagaimana TNI dan Polri difungsikan untuk melakukan pengamanan konflik. Akibatnya, aparat keamanan kurang maksimal berperan dan kelihatan tidak profesional sebagai syarat untuk melakukan de-escalasi konflik dalam pengertian membuka jalan bagi adanya perdamaian.

“biang-kerok” penyulut konflik. Namun, provokasi dari yang berkepentingan bagi terjadinya konflik (*conflict by design*), lebih intensif disosialisasikan di lapangan sehingga hal itu termentahkan dan berulang. Mengimbangi provokasi ini, ada sebanyak 129 tokoh masyarakat dan tokoh agama antikonflik mengadakan kesepakatan Poso, tanggal 8 Januari 1999. Mereka menyerukan agar masyarakat menghentikan segala bentuk perselisihan. Bahkan, pertemuan tersebut juga menyepakati untuk menyerukan pengadilan bagi penggerak kerusuhan di Poso.

Namun, akar problematika Poso tidak tersentuh dalam kesepakatan, bahkan oleh kebijakan negara dalam mencegah konflik yang lebih luas. Akibat realitas ini, konflik laten masih mengkristal, dan mereka yang berkepentingan terus memprovokasi masyarakat melalui celah berbagai isu. Herman Parimo hanyalah satu dari aktor yang muncul ke permukaan, tetapi aktor-aktor di belakang layar masih tetap melanjutkan “kasak-kusuk”. Sekecil apa pun persoalan yang terjadi, hal ini terlalu gampang di-*blow-up*, sebab sentimen komunitas keagamaan sudah terlanjur dijadikan alat dalam mengeksplorasi konflik.²

² Melihat realitas bahwa konflik antarkomunitas keagamaan ini terlalu mudah disulut, suatu inisiatif yang bersifat mikro memang ada untuk mencegah melebarnya konflik ke wilayah mereka. Salah satunya adalah Kesepakatan Tokorondo antara kepala Desa Tokorondo (Muslim) dengan kepala Desa Masani (Kristen) pada tanggal 25 Mei 2000. Mereka sepakat untuk saling melindungi kedua desa bila salah satu diserang. Namun, kesepakatan tersebut tidak mampu menahan gempuran provokasi. Warga Desa Masani (Kristen) tidak mampu membantu membendung serangan ke Desa Tokorondo, 27–28 Mei 2000. Kesepakatan mikro lintas komunitas Islam-Kristen telah dihancurkan oleh kekuatan lain (massa) dari luar kedua desa, yang akhirnya memaksa mereka terlibat atau setidaknya kena imbas dari konflik. Upaya-upaya damai skala mikro memang banyak dilakukan, tetapi tak mampu bertahan dari pemaksaaan pelibatan konflik oleh massa yang terprovokasi. Bahkan, pada Mei –Juni 2000, konflik mencapai puncak eskalasi, baik dari segi wilayah konflik, jumlah pelaku konflik, maupun dari segi korban kekerasan. Dalam konteks ini, sesuatu telah terjadi dengan apa yang disebut tragedi kemanusiaan di Poso. Solidaritas lintas wilayah mulai bermunculan dan segi ideologis konflik telah mengkristal. Di kalangan Kristen, solidaritas ini meliputi Laskar Manguni, Laskar Kristen, dan lain-lain yang tak teridentifikasi. Di kalangan Islam sejak Juni 2001, hal ini berkenaan dengan kedatangan pendukung dari orang-orang yang tergabung dalam Laskar Jihad.

Namun, elemen-elemen perdamaian di lingkungan masyarakat tidak putus harapan. Inisiatif tetap bermunculan. Rujuk Sintuwu Maroso yang dihadiri tokoh adat dari 13 kecamatan yang ada di Poso merupakan contohnya. Jadi, hal ini berbeda dengan inisiatif-inisiatif kesepakatan yang lebih dipijakkan pada perspektif komunitas keagamaan sehingga basis pesertanya mewakili dua komunitas agama Islam-Kristen. Pada Rujuk Sintuwu Maroso, pijakannya berada pada perspektif adat. Bahkan, untuk menekankan perspektif adat, kesepakatan pun dirumuskan dalam bahasa lokal Pamona. Namun, inisiatif penyelesaian konflik melalui pendekatan adat ini ternyata tak mampu menghentikan kekerasan. Ketika realitas konflik lebih diideologisasi secara kental oleh isu komunitas keagamaan, pendekatan kultural dalam situasi konflik yang masih berada pada puncak eskalasi menjadi tidak terlalu berarti.

Ketika Deklarasi Malino (Desember 2001) dikumandangkan dan ternyata berhasil menjadi momentum bagi terjadinya de-escalasi konflik, upaya-upaya damai yang digerakkan oleh inisiatif masyarakat baru memperlihatkan efektivitasnya. Di berbagai tempat dilakukan inisiatif perdamaian yang dilakukan atas inisiatif masyarakat, meski berbagai kegiatan itu memang bermuara pada upaya mengimplementasikan kesepakatan Malino. Kegiatan-kegiatan yang berasal dari akar rumput ini meliputi bermacam-macam kegiatan mulai dari pertandingan olah raga, kesenian, maupun berbagai kegiatan kultural. Kriesberg berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat interaksi dan saling-ketergantungan antara pihak-pihak yang tadinya berkonflik, akan semakin membatasi munculnya konflik baru. Munculnya saling pengertian dan berkembangnya norma-norma bersama juga akan dapat mencegah konflik.³ Pendapat tersebut senada dengan Asutosh Varshney

³ Louis Kriesberg, *Constructive Conflicts From Escalation to Resolution* (Maryland: Rowman and Littlefield Publisher Inc., 2003), hlm. 384.

yang mempelajari konflik antara pengikut Islam dan Hindu di India. Varshney mengatakan bahwa ikatan/pertalian hubungan antara etnis/pemeluk agama yang berbeda dapat mencegah konflik.⁴

Civil society (CS) kemudian cukup berperan dalam membuka ruang publik dan interaksi sosial yang relatif inklusif di Ambon. Khususnya kelompok LSM, akademisi, dan tokoh-tokoh agama/adat/tokoh masyarakat yang berorientasi dan berinteraksi lintas agama/suku, sejak awal munculnya konflik hingga de-escalasi konflik dan rekonsiliasi lewat panas-pela, bisa sangat berperan. Pembukaan dan perluasan ruang-ruang publik (*public spaces*) dalam rangka saling berbaikan (*baku bae*) seperti pasar-pasar, terminal-terminal, kantor-kantor pemerintah, lapangan/gedung olahraga, sekolah-sekolah, di Ambon, Maluku yang saat ini bisa diakses baik oleh kelompok Islam maupun Kristen –di tempat-tempat tersebut mereka tidak lagi eksklusif tapi mulai mencair/relatif inklusif– sebelumnya cukup banyak difasilitasi oleh LSM (termasuk dengan dukungan LSM internasional), dan para tokoh lokal. Pemerintah (pusat dan daerah) ikut membantu inisiatif tersebut sehingga nampak di sini adanya sinergi dari pelbagai kekuatan (negara dan masyarakat). Adanya relasi yang signifikan antara hadirnya *public space* dengan mencairnya/meningkatnya interaksi sosial lintas agama/suku di Ambon tersebut menunjukkan kebenaran teori Kriesbeg dan Varshney.

Bila ditinjau dari tahapan resolusi konflik, kondisi Ambon saat ini sudah mencapai tahap *peace building*, yaitu rekonsiliasi pada tahap awal. Disebut “awal” karena segregasi tempat tinggal berdasarkan agama masih sangat terasa. Segregasi pemukiman bisa pula dilihat sebagai salah satu upaya jangka pendek untuk mendukung

resolusi konflik itu sendiri. Hal ini mengingat secara historis mulai zaman kolonial Belanda, masyarakat Ambon Islam-Kristen telah “terbiasa” hidup terpisah berdasarkan pemilahan agama (warisan kebijakan diskriminatif dan *devide et impera* Belanda di Maluku).⁵ Namun untuk ke depan, masyarakat Ambon yang ideal adalah masyarakat yang plural dan demokratis yang diikat oleh kearifan lokal yang mereka bangun. Masyarakat Ambon saat ini terlihat telah memiliki semacam daya tahan (*resilience*) terhadap provokasi. Kondisi ini lahir antara lain karena difasilitasi dengan kinerja aparat pemerintah (TNI/Polri dan pemda) yang semakin profesional dan mulai adanya usaha-usaha penegakan hukum.⁶

Bila dibandingkan dengan Ambon dan Poso, wilayah Maluku Utara melewati proses resolusi konflik yang lebih cepat, kendati proses menuju perdamaian sejati tetap harus dilaksanakan secara perlahan. Proses resolusi konfliknya ditandai dengan relatif kuatnya dukungan masyarakat kepada negara dan pihak yang mengupayakan perdamaian, ditambah lagi sikap terbuka pemangku adat dan agama terhadap konsep perdamaian yang dimotori oleh militer dan pemerintah. Di Jailolo, masyarakat menyambut baik pembentukan Tim 30 yang cenderung diprakarsai oleh pihak militer. Begitu pula di Tobelo, masyarakat merespons positif prosesi awal penjemputan pengungsi Muslim yang diprakarsai oleh pemerintah daerah.

Hasilnya terlihat dengan jelas di Tobelo. Resolusi konflik tergolong berjalan dengan cepat, padahal pada kenyataannya, Tobelo (dan juga Galela) merupakan wilayah

⁵ Richard Chauvel, *Nationalists, Soldiers and Separatists* (Leiden : KITLV Press, 1990).

⁶ Pemilu legislatif 2004 dan pilpres langsung telah berlangsung dengan sukses di Ambon. Hasil pemilu tersebut juga bisa dipandang sebagai bentuk lain dari resolusi konflik. Hal ini merupakan langkah awal penciptaan kestabilan baru dan demokratisasi di daerah bekas konflik tersebut. Pilkades juga telah berlangsung di beberapa tempat di Pulau Ambon dan Lease (Maluku Tengah).

⁴ Asutosh Varshney, *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslim in India* (New York: Yale University Press, 2002), hlm. 363.

konflik terpanas. Faktor terpenting yang membuat proses perdamaian di Maluku Utara berbeda dan lebih maju dibandingkan dengan di Ambon dan di Poso, ialah menyangkut struktur sosial masyarakat setempat di mana antara Muslim dan Nasrani praktis terdapat hubungan kekeluargaan dalam satu marga. Hal ini terutama dijumpai di tiga wilayah, yakni Tobelo-Jailolo-Bacan, di mana di dalam satu marga ada yang beragama Islam dan ada yang Nasrani. Walau agak kurang menonjol, hubungan kekeluargaan marga antara yang Muslim dan Nasrani juga terdapat di Galela dan Halmahera Barat.⁷

Penelitian ini menemukan ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara proses perdamaian di Jailolo, Tobelo, dan Ternate. Untuk wilayah Jailolo, peran tokoh agama lebih sentral dibanding dengan tokoh adat. Hal ini berbeda dengan di Tobelo yang peran tokoh adat justru lebih didengar karena pada dasarnya pemangku adat di Tobelo adalah wakil dari tokoh-tokoh agama dari kedua belah pihak. Hal ini pun tercermin pada tradisi yang selama ini berkembang dan hidup di Tobelo di bawah payung *Hibualamo*. Perbedaan ini tidak mengherankan karena di Jailolo tidak mengenal rumah besar yang dijadikan tempat pertemuan adat seperti Hibualamo, sebagaimana dijumpai dan dipelihara di Tobelo. Memang di Jailolo, semacam rumah adat ada yang bernama Saboa, tetapi rumah ini hanya ditemukan di kampung-kampung terutama yang beragama Nasrani. Rumah Saboa tidak lebih hanya merupakan rumah adat kecil yang menaungi satu komunitas

(Nasrani) saja.⁸

Proses damai di Jailolo ditandai pula dengan pembentukan Pasar Kaget Akadiri Jailolo. Pasar sebagai transaksi pertukaran kebutuhan manusia secara tak disengaja justru mempercepat proses perdamaian di kalangan masyarakat Jailolo. Pasar ini awalnya hanya terbatas digunakan oleh pihak Nasrani yang membutuhkan kebutuhan pokok karena pasar resmi yang didirikan oleh pemerintah tidak beroperasi selama konflik terjadi. Pasar yang terletak di kompleks asrama militer muncul pertama kali sekitar tahun 2002, sebagai jawaban akan kebutuhan para pengungsi akan bahan pokok. Perlahan-lahan dengan semakin berkembangnya rasa aman dan kepercayaan yang timbul di antara kedua komunitas membuat pasar ini semakin ramai dan interaksi kedua komunitas semakin terjalin lancar.

Proses resolusi konflik yang agak berbeda dapat dilihat di Tobelo. Masyarakat Muslim dan non-Muslim Kecamatan Tobelo Halmahera Utara, Maluku Utara akhirnya sepakat mengakhiri permusuhan, yang diwujudkan dalam deklarasi damai masyarakat pada 19 April 2001 di Lapangan Adat Hibualamo. Perjanjian damai ini dimotori oleh 12 tokoh agama (6 orang wakil dari Nasrani dan 6 orang wakil dari Muslim). Inti dari deklarasi damai ini, antara lain sepakat untuk menghentikan permusuhan; tidak saling menghina, melecehkan, mempermalukan; menghormati, menjaga dan melindungi tempat ibadah dan umatnya serta

⁷ Kesediaan secaraikhlasuntukmelupakandendamdanmenerima kenyataan, serta bersikap tidak lagi menoleh ke belakang membuat proses perdamaian di Maluku Utara cepat terwujud. Di samping itu, perasaan lelah berkonflik dan kesadaran bahwa tidak ada yang diuntungkan dengan konflik ini membuat mereka mau duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi untuk melaksanakan perdamaian. Walau terdapat semacam rasa curiga dan kekhawatiran ketika pertama kali bertemu setelah peristiwa kerusuhan, akan tetapi pada akhirnya, mereka dapat saling menerima kembali.

⁸ Peran yang sentral antara tokoh adat dan agama ini tidak kita temui pada proses perdamaian di Ternate. Ternate merupakan ibu kota provinsi yang kontrol pemerintah (daerah dan pusat) cenderung dominan sehingga proses perdamaian cenderung lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah tanpa bantuan tokoh adat dan agama. Peran yang seharusnya diemban oleh Sultan Ternate sebagai simbol pemersatu adat dan agama ternyata gagal disandang oleh Sultan Ternate dalam menghadapi konflik di Maluku Utara pada waktu itu. Hal ini dapat kita lihat pada waktu Sultan Ternate gagal berdiri secara netral dalam kasus perebutan wilayah antara Kao dengan Malifut. Sikap Sultan ini cenderung dibaca sebagai ketakutan Sultan akan kehilangan basis dukungan tradisionalnya.

mengupayakan kehidupan yang harmonis; serta tidak mengenang dan melupakan masa lalu serta tidak saling menyalahkan atau membenarkan diri dan orang lain.⁹

Prospek Perdamaian di Tanah Bergolak

A. Poso

Saat ini cenderung telah memasuki masa rekonsiliasi konflik walaupun pembunuhan sporadis masih terjadi. Perang terbuka berskala besar sudah tidak ada lagi. Momentum de-escalasi terutama terjadi sejak disepakatinya deklarasi Malino. Namun demikian, dalam konstelasi kehidupan Poso, kejadian yang berupa penembakan, pemboman, dan juga kekerasan individual secara sporadis ternyata masih muncul. Apa dan mengapa hal itu terjadi? Apakah hal itu masih merupakan bagian perpanjangan dari konflik? Untuk mendapatkan jawaban secara pasti, hal ini terlalu sulit. Sebab, analisis yang muncul memang beraneka ragam. Suatu analisis melontarkan tuduhan pada aparat keamanan, yang disebut tidak rela membiarkan Poso menjadi aman kembali, dan berusaha mempertahankan *status quo* berupa Poso yang “Aman Tapi Mencekam” (ATM), sehingga proyek “keamanan” bagi Poso dapat terus dinikmati. Namun, analisis lain menilai kekerasan sporadis dapat pula dilakukan oleh para korban konflik Poso yang merasa tidak puas terhadap penanganan dan penegakan hukum pemerintah.

Kekerasan sporadis dapat pula dianalisis sebagai sebuah rekayasa yang dilakukan oleh kelompok elite yang terancam oleh tangan-tangan hukum. Di antara mereka terutama mencakup para pelaku penyimpangan dana bantuan yang disalurkan untuk

⁹ Mereka juga sepakat untuk tidak lagi menggunakan simbol agama apabila terjadi perkelahian antar penduduk, sebaliknya saling menolong dan bekerja sama dalam mencari nafkah. Deklarasi damai ini kemudian ditindaklanjuti melalui program pemulangan pengungsi Muslim Tobelo yang selama setahun terkatung-katung nasibnya di Ternate ke Tobelo. Ribuan pengungsi Muslim berasal dari Desa Gamsungi, Guruwa, Popilo dan Desa Luari lalu disambut oleh pihak sebelah (Kristen) di lapangan Hibualamo.

membangun kembali Poso. Sebagai upaya penyelamatan, mereka melakukan berbagai langkah kekerasan untuk memancing kembali terjadinya konflik antarkomunitas, sehingga aparat akan lebih terkonsentrasi lagi menangani persoalan konflik.¹⁰

B. Ambon.

Kurang maksimalnya peran negara dalam manajemen de-escalasi konflik dan intervensi kemanusiaan di Ambon, Maluku cenderung merupakan kesalahan fatal. Apalagi pemerintah daerah terkesan hanya menunggu program-program dan dana dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Ambon dapat dikatakan masih “setengah hati” dan belum menyentuh secara tuntas akar-akar masalahnya. Namun di lain pihak, suatu kesadaran di kalangan masyarakat Ambon (baik Islam maupun Kristen) telah tumbuh untuk berdamai dan hidup kembali secara normal karena “sudah lelah” berperang. Proses pembelajaran dari konflik telah mereka dapatkan sekarang sebagaimana pepatah mengatakan bahwa “menang jadi arang kalah jadi abu”.

Meskipun denyut kehidupan kota Ambon saat ini sudah semakin “normal”, pemerintah tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya begitu saja. Komitmen pemerintah untuk melaksanakan janji Inpres No.6/2003 untuk membantu pembangunan kembali Ambon, Maluku serta ikut menyelesaikan

¹⁰ Analisis lain memaparkan bahwa kekerasan terjadi sebagai perpanjangan dari dinamika politik lokal. Jika di era sebelum konflik didominasi oleh kelompok Islam maka pada era pascakonflik yang terjadi justru sebaliknya, yakni dominasi kelompok Nasrani. Penjungkirbalikan penguasaan sumber-sumber politik terjadi terutama seiring dengan diberlakukannya kebijakan pemekaran daerah Poso sehingga mengubah komposisi kependudukan, yang di era sistem politik berdasar pemilihan langsung sangat berimplikasi pada struktur penjabat di lingkungan legislatif dan eksekutif. Memang, pengalaman traumatis akibat konflik menyebabkan kedua kelompok sangat berhati-hati untuk mencegah meletusnya konflik yang baru. Namun, *power sharing* yang muncul di Poso “baru” pascapemilu legislatif 2004 dan Pilkada Juni 2005 jika tidak dikelola sangat dengan mudah memunculkan konflik baru dengan substansi seperti yang lama.

masalah pengungsi, masalah kepemilikan tanah/bangunan mantan pengungsi, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja serta tugas pemda mewujudkan *good local governance*, tidak bisa ditunda-tunda dalam rangka mengisi dan memelihara momentum rekonsiliasi. Bila tidak, stabilitas yang masih rapuh saat ini akan kembali hancur. Isu ekonomi di Ambon saat ini cenderung telah mulai menggeser isu politik dan isu kekerasaan.

C. Maluku Utara

Masa depan perdamaian di Maluku Utara boleh dikatakan masih tetap terbuka. Setelah hampir dua tahun saling bunuh telah membuat masyarakat lelah. Sebagian pengungsi mulai kembali ke desa yang mereka tinggalkan, dan beberapa desa yang tercabik mulai melakukan upaya-upaya pemulihan. Kecuali Tidore, di semua wilayah bekas konflik di Malut sebenarnya telah tercapai suatu pola pemukiman yang memunculkan semacam pembauran relatif. Setidaknya, hal ini dilihat secara fisik, di mana di dalam sebuah desa antara pemeluk Islam dan Nasrani sudah dapat hidup berdampingan. Pembauran secara fisik dalam pola pemukiman maupun di lingkungan kerja tersebut telah mendorong mulai terjalannya kontak sosial dan komunikasi sosial yang lebih intens di antara Muslim dan Nasrani, walaupun di sisi lain secara umum ada konfigurasi wilayah yang berubah.¹¹

¹¹ Perubahan konfigurasi dimaksud ialah kalau dulu konsentrasi pemukiman Nasrani dijumpai di Ternate sebelah Utara dan atau di Indonesia, di samping tentunya banyak terdapat di Halmahera Utara, tetapi kini konfigurasinya berubah dan pusat pemukiman Nasrani berpindah dan lebih terkonsentrasi di Tobelo-Galela atau ke Jailolo. Tobelo-Galela kini praktis lebih merupakan daerah yang didominasi oleh mayoritas penduduk Nasrani, baik dilihat dari jumlah penduduk maupun penguasaan atas kehidupan ekonomi dan politik setempat. Kecenderungan berbeda kita jumpai di Tidore, kini Tidore menjadi semakin homogen dan mungkin menambah kesan eksklusif sebagai sebuah wilayah Muslim. Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa sebagian besar warga Nasrani memilih tidak kembali ke Tidore, karena masyarakat Nasrani Tidore kini terbuka peluang untuk kembali ke tempat yang dirasa lebih “nyaman” yakni di Tobelo-Galela-Jailolo; kendati di wilayah-wilayah itu antara Muslim dan Nasrani telah belajar untuk kembali hidup bersama secara berdampingan.

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik, yakni tahapan de-escalasi konflik dan intervensi kemanusian dan negosiasi politik. Persiapan dan pelaksanaan tahapan *problem-solving approach* dan tahapan *peace building* di ketiga wilayah, cenderung belum tercapai terutama untuk kasus Poso yang masih ‘jalan di tempat’ pada tahap de-escalasi dan intervensi keamanan.

Dalam konteks tertentu *power sharing* keterwakilan etnisitas/agama selain kemampuan, dalam penetapan bupati (pilkada) di Maluku dan Maluku Utara, bisa jadi dianggap sebagai upaya *problem-solving approach*. Upaya menghidupkan Hibualamo, program untuk anak di daerah konflik LSM Save The Children di Halut, model desa multikultural Wayame, di Ambon, program *focal-point* Depsol dan Depag, Jembatan Perdamaian dan Forum Komunikasi Antarumat Beragama, diharapkan bisa menjadi embrio tahapan *peace building* yang operasional dan berdampak nyata di kemudian hari.

Catatan Penutup

Keterlibatan negara dan masyarakat dalam proses resolusi konflik di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara relatif beragam sesuai keadaan setempat ketika mengalami status darurat militer, darurat sipil, dan tertib sipil. Poso di Sulteng sampai tahun 2005 (era Presiden SBY) masih mengalami kondisi pembunuhan, penembakan, dan pengeboman sporadis. Hal ini menunjukkan masih ada gejala *weak state* (negara lemah) atau *failure state* (negara gagal) de-escalasi konflik di Poso. Langkah perlucutan senjata dan penghentian kekerasan tampaknya relatif berhasil dilakukan. Aparat yang mestinya memadamkan konflik, pada awalnya

cenderung tidak netral atau berpihak membela satu kelompok. Bisnis persenjataan dan rasa aman, cenderung terasa ada dan tiada. Keadaan seolah-olah telah aman tetapi masih mencekam. *Entry-point* pihak ketiga untuk mendamaikan masih belum berhasil.

Kondisi Ambon Maluku pun awalnya demikian. Bila ditinjau dari tahapan resolusi konflik, kondisi pada saat penelitian dilakukan masih dalam tahap persiapan untuk menuju *peace building*, yaitu rekonsiliasi pada tahap awal. Beberapa indikator kondisi konflik masih belum sepenuhnya menuju ke arah *peace building*, karena tahap intervensi konflik masih terlalu banyak persoalan. Baru disebut “awal” karena pengaturan hubungan sosial dalam bentuk segregasi tempat tinggal berdasarkan agama masih sangat jelas dan kemampuan pelibatan untuk masuk lewat program rekonsiliasi relatif kurang berjalan maksimal, dan dampaknya cenderung belum terlalu besar. Namun, segregasi tersebut bisa pula dilihat sebagai salah satu upaya jangka pendek untuk mendukung resolusi konflik itu sendiri.¹²

Peran negara dan masyarakat di Maluku Utara relatif berhasil dalam de-escalasi konflik dan negosiasi, perlucutan senjata relatif berhasil di Kao, Ternate, Tidore, Tobelo, dan Jailolo. Pendekatan budaya *Hibualamo* pun sudah dilakukan di

Halmahera Utara. Namun demikian, hal ini menimbulkan masalah dalam intervensi kemanusiaan, yaitu penanganan relokasi dan rehabilitasi pengungsi Malut, Malut dan Poso di Ternate, Manado dan Bitung belum tuntas walaupun status pengungsi dinyatakan sudah tidak ada lagi. Kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi, transformasi *skills of life* atau kemandirian untuk para pengungsi belum maksimal.

Selanjutnya, pola relasi masyarakat dan negara dalam tahap pertama dan kedua resolusi konflik bisa pula dijelaskan lebih mendalam dengan mengacu pada elaborasi teori *Strategic Choices* dari Sung Hee Kim dan kondisi lapangan di daerah:¹³

Kelima indikator tersebut mulai tampak secara berangsur-angsur untuk kasus Ambon di Maluku dan Tobelo-Jailolo di Maluku Utara. Untuk Poso, Tidore, Ternate, Bitung, dan Manado berdasarkan temuan data peneliti di lapangan, daerah-daerah itu masih mengalami berbagai masalah pengelolaan pemberahan. Desa Wayame di Ambon, Maluku secara relatif tampaknya adalah sebuah contoh pelajaran model resolusi konflik yang amat baik bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan politik (*state planning*), khususnya penataan tata ruang di daerah-daerah yang mengalami masalah segregasi sosial dan kependudukan. Kasus Desa Wayame cenderung memiliki ketahanan sosial terhadap konflik dan tidak terseret arus dahsyat konflik karena desa ini adalah sebuah desa yang multietnik dan multikultur serta multiagama. Hal ini disebabkan adanya pengaturan dan kesepakatan hubungan sosial (*regulate social relationships*). Masyarakatnya yang berlatar belakang berbeda, tetapi berpendidikan, ternyata tidak terimbas oleh konflik yang terjadi. Di desa ini, konsep pembauran sosial terjadi melalui

¹² Suatu kecenderungan peralihan kekuasaan dari masa otoritarian dari Soeharto ke B.J. Habibie membutuhkan adaptasi karena persoalan-persoalan krisis politik dan ekonomi yang mereka hadapi terlalu besar dengan kapasitas pemerintahan yang rendah dan legitimasi politik yang kurang. Bahwasanya, penanganan konflik diserahkan “sepenuhnya” kepada aparat keamanan dengan kontrol yang amat rendah. Peran Pemerintah Pusat yang kurang maksimal dalam de-escalasi konflik tidak ditopang oleh peran pemerintah daerah yang seharusnya dapat menjadi aktor implementasi atas kebijakan-kebijakan de-escalasi konflik. Namun, peran ini tampaknya kurang dimaksimalkan, karena koordinasi penanganan konflik dikendalikan oleh pihak militer. Lemahnya koordinasi dan strategi dalam penanganan konflik, dengan alasan bahwa TNI dan Polri takut dianggap melanggar hukum. Faktor ini menandai bahwa Indonesia belum memiliki “tools of law” atau perangkat hukum yang mengatur bagaimana TNI dan Polri difungsikan untuk melakukan pengamanan konflik. Akibatnya, aparat keamanan kurang maksimal berperan dan kelihatan tidak profesional sebagai syarat untuk melakukan de-escalasi konflik dalam pengertian membuka jalan bagi adanya perdamaian.

¹³ Lihat Sung Hee Kim, et.al., *Sosial Conflict: Escalation, Stalemate, Deescalation*, (Mc Graw-Hill, 2nd Edition, 1986), hlm. 30.

Tabel Pola Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik

Peran Negara	Peran Masyarakat	Pola Hub. Neg.-Masy.	Kecenderungan Status Daerah	Keterangan
Strong (kuat), Dominan	Strong (kuat), partisipatif	Trust (saling percaya), Demokratis	Ambon, Tobelo, Ternate (era tertib sipil)	<ul style="list-style-type: none"> -Power sharing pilkada. - Segregasi jk. pendek. - Desa Wayame dan kebangkitan <i>Hibulamo</i> di Halut. -Forum Komunikasi Antar Umat. -Jurnalisme damai.
Strong (kuat), Dominan	Weak (lemah), Subordinat	Dis-trust (tdk. saling percaya), Elitis	Ambon (era darurat militer dan sipil). Tidore (era tertib sipil)	<ul style="list-style-type: none"> - Segregasi pemukiman. -Komunitas relatif homogen.
Weak (lemah), Failure (gagal)	Strong (kuat), trust (percaya) Partisipatif	Distrust (saling curiga), Voluntary (kemandirian)	Jailolo (darurat militer, darurat sipil dan tertib sipil)	<ul style="list-style-type: none"> - Tentara/polisi menghilang saat konflik pecah. -<i>Entry point</i> oleh TNI relatif belum berhasil sampai terbentuk Kelompok 30 di Jailolo - Re-segregasi relatif berhasil. -<i>Mental-healing</i> belum tuntas. -Program Jembatan Perdamaian.
Weak (lemah), Failure (gagal)	Weak (lemah), Subordinat	Distrust (saling curiga), Omission (kekosongan)	Poso, Sulteng (Habibie, Gus Dur, Mega, SBY)	<ul style="list-style-type: none"> -Perlucutan senjata belum tuntas. -Power sharing pilkada belum membuat rasa aman.

Diolah dari mengelaborasi teori Joel Migdal oleh Syafuan Rozi & Septi Satriani, P2P LIPI Desember, 2005.

Catatan: Indikator yang digunakan untuk mengukur kuat atau lemahnya peran negara dan masyarakat adalah kriteria:

1. *Leadership/kepemimpinan* negara dan masyarakat.
2. *State planning/*perencanaan negara dan partisipasi masyarakat.
3. *Capacities to penetrate/kemampuan* pelibatan untuk masuk (*entry point*).
4. *Regulate social relationships/pengaturan* hubungan sosial.
5. *Extract resources and appropriate or use resources in determined ways/*pengelolaan sumber daya yang langka dan diperebutkan dalam bentuk keadilan dan *sharing* (berbagi).

interaksi sosial yang tidak bersifat simbolik, tetapi lebih pada interaksi sosial yang semestinya. Ketika konflik terjadi, kesadaran tumbuh di antara mereka untuk saling berbagi, menjaga dan melindungi di antara kedua komunitas Islam dan Kristen yang ada di sana (*extract resources and appropriate or use resources in determined ways*).

Kebangkitan budaya “rumah besar” *Hibulamo* dan *power sharing* Kristen-Islam dalam jabatan bupati hasil pilkada langsung di Halut pun bisa dijadikan model rekonsiliasi di Maluku Utara. Hubungan negara dan masyarakat di Tobelo era tertib sipil misalnya, cenderung berangsur menuju pola saling percaya (*trust*). Berikut ini bagan kecenderungan peran negara, masyarakat, dan pola hubungannya pada tahapan de-escalasi dan intervensi kemanusiaan.

Upaya-upaya pemulihan keamanan yang dilaksanakan oleh aparat keamanan di Poso cenderung menemui beberapa kendala. Kendala pertama berkaitan dengan masih adanya dendam di kalangan para kelompok radikal. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang dulu pernah terlibat konflik dan juga dulu pernah menjadi korban. Kelompok ini tidak berada pada masyarakat secara umum, namun hanya pada sekelompok kecil masyarakat saja. Kelompok ini umumnya bersikap pasif dan tidak mau bekerja sama dengan aparat keamanan dalam mencari pelaku.

Kendala yang kedua berkaitan dengan sistem kependudukan yang tidak diatur dengan baik. Semenjak meletusnya konflik Poso hingga ke masa pascakonflik, sistem kependudukan Poso belum ada penataan. Pada saat terjadinya konflik,

Tabel Dua Tahap Resolusi Konflik Peran dan Hubungan Negara-Masyarakat

Tahapan Resolusi Konflik	Wilayah	State Position	Society Position	State-Society Relation
De-escalasi	Sulteng (Poso)	<i>Weak</i> (lemah), <i>Failure</i> (gagal), <i>Distrust</i>	<i>Weak</i> (lemah), Subordinat, pasif <i>Distrust</i>	<i>Anarchical/Distrust</i> (saling curiga), <i>Ommision</i> (kekosongan) <i>Contending</i>
	Maluku (Ambon)	<i>Weak</i> (lemah), <i>Failure</i> (gagal), <i>Distrust</i>	<i>Weak</i> (lemah), Subordinat, pasif <i>Distrust</i>	<i>Anarchical/Distrust</i> (saling curiga), <i>Ommision</i> (kekosongan) <i>Contending</i>
	Maluku Utara: Tobelo-Galela	<i>Weak</i> (lemah), <i>Failure</i> (gagal), <i>Distrust</i>	<i>Weak</i> (lemah), Subordinat, pasif	<i>Anarchical/Distrust</i> (saling curiga), <i>Ommision</i> (kekosongan)
	Ternate	<i>Weak</i> (lemah), <i>Failure</i> (gagal)	<i>Weak</i> (lemah), Subordinat, pasif	<i>Diffused/Distrust</i> (Kabur, saling curiga)
	Jailolo	<i>Weak</i> (lemah), <i>Failure</i> (gagal)	<i>Weak</i> (lemah), Subordinat, pasif	<i>Diffused/Distrust</i> (Kabur, saling curiga)
	Tidore	<i>Weak</i> (lemah)	<i>Distrust</i> , <i>Weak</i> (lemah), Subordinat, pasif	<i>Diffused/Distrust</i> (saling curiga), <i>Contending</i>
	Sulteng (Poso)	<i>Weak</i> (lemah), <i>Failure</i> (gagal), <i>Distrust</i>	<i>Weak</i> (lemah), Subordinat, pasif <i>Distrust</i>	<i>Diffused/Distrust</i> (saling curiga), <i>Contending</i>
	Maluku (Ambon)	Patronage, Menyediakan penengah (<i>provide mediation</i>), <i>Trust</i> .	Semi-Partisipatif, <i>Trust</i>	<i>Pyramidal</i> , Elitis <i>Problem Solving</i>
	Maluku Utara: Tobelo-Galela	Patronage, Menyediakan penengah (<i>provide mediation</i>), <i>Trust</i> .	Mengangkat identitas bersama (<i>Foster shared identities</i>)	<i>Problem Solving</i>
	Ternate	Patronage, <i>Weak</i> (lemah), <i>Failure</i> (gagal), <i>Distrust</i>	<i>Weak</i> (lemah), Subordinat, pasif <i>Distrust</i>	<i>Pyramidal</i> , Elitis
	Jailolo	Menyediakan penengah (<i>provide mediation</i>)	Semi-Partisipatif, inisiatif, <i>Voluntary</i> (kemandirian) <i>Trust</i>	<i>Problem Solving</i>
	Tidore	Patronage, <i>Weak</i> (lemah)	<i>Distrust</i> salah satu pihak/keduanya mengundurkan diri	<i>Pyramidal</i> , Elitis <i>Withdrawal</i>

Diolah oleh: Syafuan Rozi, Emilia Yustiningrum & Septi Satriani, P2P LIPI Desember, 2005.

Keterangan: *Trust* = saling percaya. *Distrust* = masih saling tidak percaya. *Contending* = saling bersaing. *Problem Solving* = sama-sama berupaya memecahkan masalah. *Yielding* = sama-sama memberi konsensi/mengalah. *Withdrawal* = salah satu pihak/keduanya mengundurkan diri.

beberapa kepala desa mengungsi, ada pula yang tetap tinggal di wilayah ini. Permasalahan muncul ketika datangnya para pengungsi dari daerah lain yang menempati wilayah tersebut dan belum didaftar dengan baik. Akibatnya, orang menjadi sangat mudah masuk dan keluar dari wilayah Poso dan kesulitan dalam melacak pelaku bila terjadi kekerasan. Sistem siskamling juga tidak dijalankan, sehingga tidak bisa mendukung kinerja aparat keamanan.¹⁴

Faktor trauma di kalangan anggota masyarakat masih begitu kuat karena konflik yang pernah terjadi. Hancurnya sarana ibadah baik Muslim dan Kristen belum diperbaiki, daerah kosong karena penduduknya yang mengungsi, dan belum berani kembali ke tempat asal. Selain itu, hal ini berkenaan dengan masalah hak-hak perdata milik pengungsi yang belum diperbaiki karena mereka yang mengungsi ini meninggalkan rumah dan tanah perkebunan sehingga pemilik tidak lagi menguasai rumah yang ditinggalkan dan lahan perkebunan yang telantar.

Konflik yang berlangsung antara 1999–2000 telah mengubah pola hubungan konfigurasi etnik-agama di Maluku Utara. Pusat pemukiman Nasrani kini cenderung lebih terkonsentrasi di Tobelo-Galela atau ke Jailolo, baik dilihat dari jumlah penduduk maupun penguasaan atas kehidupan ekonomi dan politik setempat. Kecenderungan berbeda kita jumpai di Tidore. Kini Tidore menjadi semakin homogen dan mungkin menambah kesan eksklusif sebagai sebuah wilayah Muslim. Dengan kata lain, walaupun kalau dilihat dari pemukiman penduduk telah terjadi pembauran antara Muslim-Nasrani,

namun pascakonflik masyarakat berada pada titik di mana hubungan antara Islam-Kristen berupa saling menguatkan identitas ideologis masing-masing. Kecenderungan demikian tentu harus dikelola dengan baik dan diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan beberapa wilayah, khususnya di Tobelo, masih memperlihatkan kecenderungan tiap-tiap pihak untuk menggalang kekuatan di bidang ekonomi dan politik.

Tahapan rekonsiliasi di Maluku Utara akan terganggu bila pemerintah mengabaikan untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pascapengembalian ke daerah asal. Pengungsi masih menginginkan program relokasi dan rumah tinggal tetap, walaupun dengan program kredit murah. Kerusuhan telah membuat lahan-lahan pertanian, perkebunan, perikanan, alat-alat produksi menjadi hancur, sementara masyarakat masih mengandalkan mata pencahariannya dari sektor-sektor tersebut. Pemerintah perlu memberi perhatian untuk pemberdayaan masyarakat agar bisa melanjutkan hidup, misalnya untuk petani bagaimana pemerintah bisa membantu alat-alat pertanian dan alat-alat produksi. Peran dan pola hubungan masyarakat dan negara yang semula kabur, arogan, dan kurang partisipatif (*diffused, elitis-pyramidal*) bisa menimbulkan kendala dalam resolusi konflik di waktu mendatang.¹⁵

¹⁴ Masih banyak sisa-sisa amunisi dan senjata api yang disimpan oleh masyarakat. Senjata tersebut masih banyak yang disimpan meskipun sudah banyak juga yang telah diserahkan kepada aparat keamanan. Aparat keamanan sendiri sudah berusaha memancing dengan pemberian hadiah-hadiah untuk anggota masyarakat yang bersedia menyerahkan senjatanya, namun sebagian kelompok masyarakat ini tidak mau menyerahkan senjata mereka. Kelompok ini masih memiliki ketakutan apabila nanti sewaktu-waktu diserang dan mereka tidak bisa membela diri.

¹⁵ Program intervensi kemanusiaan sebagai bagian resolusi konflik di Maluku Utara dan Maluku masih menghadapi kendala besar berhubung fakta adanya benang kuat masalah penanganan pengungsi, di mana ribuan pengungsi masih tertahan di Kota Ternate. Banyak pengungsi belum menerima BBR (Biaya Bangun Rumah) dan bekal hidup. Pengungsi sendiri menolak pulang bila BBR dan bekal hidup belum diberikan. Kisruh masalah ini terkait erat dengan terjadinya banyak penyimpangan dan tidak seriusnya pemerintah daerah —dalam hal ini khususnya Dinas Sosial Provinsi—dalam menangani program pemulangan pengungsi. Penyimpangan yang banyak terjadi adalah akibat negara belum tegas dalam hukum dan tokoh pengungsi tidak dilibatkan secara partisipatif duduk satu meja, membuat rencana ke depan dan membuka pendanaan yang transparan. Alokasi dana pengungsi bagaikan sebuah bagi-bagi proyek di lapangan. Begitu pula penanganan pengungsi di Ambon, Maluku masih dalam keadaan yang relatif sama. Butuh keseriusan dan koordinasi berbagai pihak yang lebih baik untuk kepentingan bersama.

Usulan Rekomendasi

Ada beberapa langkah yang sebenarnya dapat dilakukan sebagai langkah awal merentas jalan panjang perdamaian pascakonflik, sebagai berikut:

1) Pertama, pembagian kekuasaan secara bergilir. Sentimen perebutan jabatan politik/ birokrasi berdasar garis komunal —bagi daerah yang baru saja terlibat konflik komunal— perlu segera diredam dengan *power-sharing* atau keterwakilan atau pergiliran etnisitas dalam kekuasaan. Suatu kota yang mayoritas didominasi agama tertentu, bisa saja pejabat/pegawai yang diangkat sebagaimana garis keagamaan penduduknya, sedangkan yang seimbang perlu ada perimbangan dan pergiliran agar tidak terjadi eskalasi konflik. Kedua, peran pemerintah daerah membangun *early warning system* menjadi penting karena berdasarkan pengalaman konflik yang pernah ada, dan juga masih beragamnya potensi konflik yang bisa muncul bisa dideteksi lebih dini.

2) Kasus desa Wayame, Saparua, Maluku, cenderung bisa menjadi sebuah contoh pelajaran model resolusi konflik yang baik bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan politik, khususnya penataan tata ruang di daerah-daerah yang mengalami masalah segregasi sosial dan kependudukan. Desa Wayame memiliki ketahanan sosial terhadap konflik dan tidak terseret arus dahsyat konflik yang terjadi karena multietnik dalam kultur serta agama penghuninya. Di desa ini, konsep pembauran sosial terjadi melalui interaksi-interaksi sosial yang tidak bersifat simbolik, tetapi lebih pada interaksi sosial yang semestinya. Ketika konflik terjadi, kesadaran tumbuh di antara mereka untuk saling menjaga dan melindungi di antara kedua komunitas Islam dan Kristen yang ada di sana. Kesadaran bukan tumbuh sesaat, tetapi melalui proses interaksi sosial yang panjang. Pendidikan menjadi salah satu

faktornya, hanya dapat dibangun melalui penciptaan masyarakat yang membaur lewat pendidikan multikultural sebagai instrumen katalisator untuk saling menghormati.

3) Perlu dibangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah diprovokasi oleh pihak lain yang ingin mencari keuntungan sendiri, di samping upaya penegakan hukum, serta perlunya jaminan kesejahteraan bagi aparat keamanan agar tidak menyalahgunakan posisinya untuk kepentingan pribadi. Di samping itu, perlu juga dipikirkan kesejahteraan secara ekonomi masyarakat, sebab kemiskinan merupakan ladang empuk bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab (provokator) untuk menjadikan mereka (orang-orang miskin tersebut) sebagai alat mencapai tujuan provokator. Program membangun Malut sebagai tujuan wisata memerlukan pelibatan masyarakat menyediakan penginapan *homestay*, di rumah keluarga. Untuk daya tariknya pemda dan masyarakat bersinergi membuat festival rakyat berkala dengan berbagai tema, sentra kerajinan, pasar seni, pasar jajanan dan oleh-oleh, budi daya hasil kelautan, wisata dan olahraga bahari.

4) Untuk menangani pengungsi, kembalikan wewenang kepengurusan pengungsi di tangan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan dihapus wewenang pihak ketiga (kontraktor), dalam hal ini melibatkan tokoh pengungsi sebagai *team-work*. Pemberian dana bantuan BBR dan biaya lauk pauk agar bersamaan sehingga dana yang sudah disalurkan tidak dialihkan untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari. Hal ini memerlukan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam hal data sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran di lapangan. Kalau perlu, masalah pengembalian pengungsi tidak hanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah dan harus mulai melibatkan tokoh-tokoh masyarakat baik adat dan agama sehingga kemungkinan menjadikan pengungsi untuk komoditas dapat dihindari. **

Daftar Pustaka

Chauvel, Richard. 1990. *Nationalists, Soldiers and Separatists*. Leiden : KITLV Press.

Sung Hee Kim, et al. 1986. *Sosial Conflict: Escalation, Stalemate, Deescalation*. Mc Graw-Hill, 2nd Edition.

Kriesberg, Louis. 2003. *Constructive Conflicts From Escalation to Resolution*. Maryland: Rowman and Littlefield Publisher Inc.

Varshney, Asutosh. 2002. *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslim in India*. New York: Yale University Press.